

# Lagi, Dugaan Korupsi Triliunan di BUMN

Lagi-lagi, dugaan korupsi muncul di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seperti diketahui, beberapa kasus dugaan korupsi di BUMN terkuak dalam beberapa tahun terakhir. Contohnya, kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023; dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di salah satu bank BUMN yang merugikan negara sekitar Rp 700 miliar dari anggaran Rp 2,1 triliun; serta kasus tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015–2022 dengan kerugian negara mencapai Rp 300 triliun. Masih ada pula kasus dugaan korupsi lain yang mengakibatkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Kasus terbaru kembali terjadi di PT Pertamina (Persero) dan terdeteksi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kasus di BUMN perminyakan ini sedikit berbeda dari kasus sebelumnya. Namun, potensi kerugian negara tetap besar karena proyek terkait memiliki nilai anggaran Rp 3,6 triliun. Banyaknya kasus korupsi di BUMN ini memicu reaksi masyarakat. Sebagian masyarakat mendesak aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan agar kasus ini diproses secara hukum.

BACA HAL 11...

## KERUGIAN KORUPSI DI BUMN

PT Timah (2015–2022)

Rp 300 T

Tol MBZ (Jakarta-Cikampek)

Rp 1.5 T

PT ASDP (Jembatan)

Rp 1.27 T

Bank BUMN (Mesin EDC)

Rp 700 M

KET

● > 1 Triliun

● < 1 Triliun

 Pertamina – Tata Kelola Minyak (2018–2023)  
➤ Dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah & kilang.

 Pertamina – Pengadaan LNG (2011–2021)  
➤ Dugaan korupsi pengadaan gas alam cair.

 LPEI – Lembaga Pembiayaan Ekspor  
➤ Potensi kerugian: Triliunan rupiah.



KPPU

EMENTERIAN  
BAHAN MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA



Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Air Base Galeão, Rio de Janeiro, Brasil, pada Sabtu pagi, 5 Juli 2025. (Foto: BPMI Setpres)

# KTT BRICS, INDONESIA TEMPATKAN POSISI SEBAGAI "BRIDGE-BUILDER"

Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Rio de Janeiro, Brasil yang berlangsung pada 6-7 Juli 2025. Ini debut perdana Indonesia hadir dalam KTT BRICS sejak bergabung secara resmi pada sejak 1 Januari 2025 lalu.

sebagai platform strategis untuk memperjuangkan kerja sama internasional yang lebih adil dan inklusif. Untuk itu, sebagai negara yang tergabung dalam Global South sekaligus anggota G20, Indonesia akan memanfaatkan forum BRICS sebagai platform untuk memperjuangkan kerja sama global yang lebih adil dan inklusif, serta memajukan kepentingan nasional dalam berbagai bidang ekonomi, keuangan, pendidikan dan teknologi.

Adapun KTT BRICS 2025 mengusung tema Strengthening Global South Cooperation to a More Inclusive and Sustainable Governance, dan dihadiri lebih dari 30 pemimpin anggota BRICS, negara mitra, undangan khusus, serta ketua organisasi internasional. Pada pertemuan ini, para pemimpin negara yang tergabung dalam BRICS akan membahas sejumlah isu politik dan keamanan global, seperti konflik yang berkepanjangan di berbagai kawasan, reformasi tata kelola global dan penguatan multilateralisme.

Selain itu, para pemimpin BRICS juga akan membahas berbagai permasalahan dan peluang kerja sama ekonomi dan keuangan, serta isu-isu lainnya seperti tata kelola artificial intelligence (AI), lingkungan dan aksi iklim, serta kesehatan global. KTT kali ini pun diharapkan akan menghasilkan Leaders' Declaration yang mencerminkan posisi dan komitmen bersama BRICS terkait isu-isu politik dan keamanan, ekonomi dan keuangan, serta keberlanjutan pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam kerangka BRICS.

Bertempat di Museum Seni Modern (MAM) Aterro do Flamengo, Rio De Janeiro, Brazil, rangkaian kegiatan KTT BRICS dimulai dengan

upacara kedatangan resmi para kepala negara dan pemerintahan negara-negara anggota BRICS yang digelar pukul 09.30 waktu setempat, diikuti dengan sesi foto bersama para delegasi pada pukul 10.30 waktu setempat

"Sustainable Governance" disiarkan secara langsung ke Media Center dan BRICS TV, kecuali untuk sesi makan siang dan pertemuan tertutup bagi media.

Selain mengikuti rangkaian sesi pleno bersama para pemimpin negara anggota dan mitra BRICS. Forum ini akan membahas isu-isu utama seperti konflik global, reformasi tata kelola internasional, penguatan multilateralisme, dan komitmen kolektif terhadap solusi bersama di tengah situasi dunia yang semakin tidak pasti.

Salah satu hasil penting KTT ini adalah Leaders' Declaration yang berisi posisi dan komitmen bersama anggota BRICS dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan keuangan, termasuk keberlanjutan pelibatan berbagai pemangku kepentingan di kerangka BRICS.

Kemudian, selain agenda utama KTT, Presiden Prabowo juga dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan pemimpin negara lain. Tujuannya adalah memperkuat kerja sama di bidang ekonomi, keuangan, pendidikan, teknologi, dan isu strategis lain. Melansir laman Kemlu, langkah ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk meningkatkan diplomasi ekonomi dan berperan aktif sebagai "bridge-builder" dalam isu-isu global.

"Presiden Prabowo akan menggunakan kesempatan ini untuk menyuarakan sikap dan posisi Indonesia sebagai 'bridge-builder' dalam berbagai isu global dan upaya kolektif di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu," dikutip dari laman resmi Kemlu RI Minggu (6/7/2025).

KTT BRICS 2025 mengusung tema "Strengthening Global South Cooperation to a More Inclusive and Sustainable Governance". Pada forum ini, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya kerja sama negara-negara berkembang, memperjuangkan tatanan ekonomi yang lebih adil, serta memastikan keterlibatan Indonesia dalam diskusi tata kelola Artificial Intelligence (AI), lingkungan, perubahan iklim, dan kesehatan global. (rls/ant/lut)

**M**engutip keterangan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Minggu (6/7/2025), salah satu yang akan disuarakan Presiden Prabowo dalam kesempatan perdananya adalah sikap dan posisi Indonesia sebagai "bridge-builder" dalam berbagai isu global dan upaya kolektif di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu.

Presiden Prabowo tiba di Air Base Galeão, Rio de Janeiro, Brasil, pada Sabtu (5/7/2025), sekitar pukul 06.30 waktu setempat. Setibanya di landasan Air Base Galeão, Presiden Prabowo disambut dengan upacara kehormatan militer. Saat melintasi karpet merah setelah menuruni tangga pesawat, terdengar tiupan terompet disertai penghormatan dari pasukan jajar kehormatan militer yang mengiringi langkah Presiden Prabowo Subianto, dikutip Setpres BPMI.

Di ujung karpet merah, Presiden Prabowo disambut oleh jajaran pejabat tinggi Brasil, yakni Duta Besar Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto, Sekretaris Promosi Perdagangan, Sains, Teknologi, Inovasi, dan Budaya Kementerian Luar Negeri Brasil, serta Komandan Airforce Base Galeão Kolonel Marcell Barros de Paula. Sementara dari pihak Indonesia turut hadir menyambut yaitu Duta Besar RI di Brasilia Edi Yusup, dan Atase Pertahanan KBRI Brasilia Kol Rizal Ashwam.

Setelah prosesi penyambutan selesai, Presiden Prabowo menaiki kendaraan resmi yang telah disiapkan dan melanjutkan perjalanan menuju hotel tempatnya bermalam selama agenda di Rio de Janeiro.

Dalam forum ini, Presiden Prabowo didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, hingga Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir.

Indonesia memandang BRICS

“  
Presiden  
Prabowo akan  
menggunakan  
kesempatan ini  
untuk  
menyuarakan  
sikap dan posisi  
Indonesia sebagai  
'bridge-builder'  
dalam berbagai isu  
global dan upaya  
kolektif di tengah  
situasi dunia yang  
semakin tidak  
menentu,”  
.....  
dikutip dari  
laman resmi  
Kemlu RI  
Minggu  
(6/7/2025).  
.....

Lula da Silva, yang bersifat tertutup bagi media.

Adapun agenda hari kedua KTT BRICS, Senin (7/7/2025), di tempat yang sama, menggelar sesi pleno bertema "Lingkungan Hidup, COP30, dan Kesehatan Global" mulai pukul 09.00.

Seluruh kegiatan utama KTT BRICS yang mengusung tema "Strengthening Global South Cooperation to a More Inclusive and

# MK Dinilai Bertransformasi Jadi Lembaga Ketiga Pembentuk UU

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemilu tingkat nasional dan Pemilu masih menjadi pembahasan di kalangan DPR RI. Bahkan muncul penilaian bahwa MK telah bertransformasi tidak hanya sekadar menjadi penguji dan penafsir konstitusi (the guardian of constitution) tetapi juga menjadi lembaga ketiga pembentuk undang-undang setelah Pemerintah dan DPR.



Gedung Mahkamah Konstitusi.

**P**erlu kita pahami bersama bahwa MK mempunyai peran sebagai negative legislator, bukan positive legislator. Pertanyaannya kemudian ketika MK dengan dalih menjaga agar Konstitusi tetap adaptif dengan dinamika jaman (living constitution) lalu bisa bertransformasi sebagai lembaga ketiga setelah presiden dan DPR menjadi perumus undang-undang?" ujar Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (5/7/2025).

Khozin mengingatkan harus ada penegasan bersama terkait fungsi dan peran MK ini. Dia juga mengatakan jangan sampai MK dengan berbagai putusan kontroversialnya menjadi ruang para pihak untuk menjadi jalan pintas menolak setiap produk perundang-undangan.

"Pembentukan produk perundangan ini kan high cost secara biaya, high cost secara tenaga, high cost secara waktu dan sebagainya. Nah jangan sampai hal ini tidak ada kepastian hukum. Kalau memang MK bertransformasi menjadi lembaga ketiga perumus UU ya sudah kita lakukan constitutional engineering terkait tugas pokok dan tusi dari MK," ujarnya.

Dia mengungkapkan dalam putusan 135/2025 tentang keserentakan Pemilu, MK telah melakukan berbagai langkah paradoks. Menurutnya putusan 135/2025 jika dibandingkan dengan putusan sebelumnya nomor 55/2019 tentang hal yang sama, ada beberapa kontradiksi. Di antaranya terkait pemilihan satu opsi dari enam opsi model keserentakan Pemilu yang diputuskan sebelumnya.

"Selain itu dalam keputusan

55/2019 MK dengan tegas menolak memberikan putusan mengenai model keserentakan karena menjadi tugas dari pembuat UU tapi di keputusan 135/2025 malah memerintahkan adanya Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal," ujar Politisi Fraksi PKB ini.

Lebih jauh, Khozin menilai pemerintah tidak bisa langsung melaksanakan putusan MK mengenai pemisahan Pemilu nasional dan Pemilu daerah. Menurutnya jika hal terjadi maka putusan MK dalam menjaga konstitusi justru memicu inkonsistensialitas.

"Secara implementasi, putusan ini tidak secara otomatis bisa dilaksanakan dalam hal ini oleh pemerintah karena berimplikasi terhadap beberapa norma. Terutama yang sering kita pahami di dalam Pasal 22E ayat 1 maupun ayat 2 dan Pasal 18 ayat 3, dan itu sudah jelas di sana tertulis bahwa pelaksanaan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali," ujar Khozin.

Kemudian, Khozin juga mempertanyakan mau menafsiri seperti apa lagi, jika ini kemudian dilaksanakan. Bahkan, dia mengingatkan jangan sampai

kemudian perintah konstitusional dilaksanakan dengan cara menabrak konstitusi. Dia mengkhawatirkan nantinya malah tidak akan berujung dan tidak ada ruang kepastian hukum.



**Pembentukan produk perundangan ini kan high cost secara biaya, high cost secara tenaga, high cost secara waktu dan sebagainya. Nah jangan sampai hal ini tidak ada kepastian hukum. Kalau memang MK bertransformasi menjadi lembaga ketiga perumus UU ya sudah kita lakukan constitutional engineering terkait tugas pokok dan tusi dari MK,"**

**Muhammad Khozin**  
Anggota Komisi II DPR RI

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, menilai putusan MK tersebut menimbulkan kebingungan dan dilema konstitusional yang serius. Hal itu tidak hanya bagi penyelenggara pemilu tetapi juga bagi masyarakat dan pembuat kebijakan.

"Tentu kami, Komisi III, terus dikejar oleh masyarakat soal apa pandangan kami terkait putusan dari MK ini. Dan saya melihat bahwa ketiga narasumber tadi sepakat bahwa putusan MK ini melaupai kewenangannya dan bahkan dinilai melaupai konstitusi," ujar Martin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI yang menghadirkan sejumlah pakar ketatanegaraan dan mantan hakim konstitusi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (4/7/2025).

"Sementara ada Undang-Undang yang disampaikan tadi, ada Undang-Undang nomor Pasal 22 yang juga

memang itu harus kita jalankan. Jadi ada dua putusan ini yang saya bertanya-tanya tadi, kalau ini tidak ada tanggapan atau tidak ada putusan yang lanjut, terus apa yang harus kita lakukan?" tambahnya.

Lebih lanjut, Martin juga meminta pandangan para narasumber, apabila DPR sebagai lembaga legislatif tidak dapat menjalankan putusan MK karena dinilai melanggar konstitusi, apakah hal tersebut dapat dibenarkan secara hukum dan ketatanegaraan.

Menanggapi hal itu, Patrialis Akbar menyampaikan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, tetapi tidak berarti kebal dari kritik publik. Ia menegaskan bahwa putusan MK tidak bisa dibatalkan oleh MK itu sendiri.

"Putusan MK itu juga gak bisa dibatalkan oleh MK. Kalau dibatalkan oleh MK berarti kredibilitas hakim MK masa lalu gak dijamin. Itu berbahaya juga. Jadi ini luar biasa dalam tataran ketatanegaraan kita," tegas Patrialis.

Ia menambahkan bahwa ketika sebuah putusan dipersoalkan oleh masyarakat luas dan juga parlemen, maka muncul pertanyaan besar terhadap validitas dan relevansinya. "Maka saya berpendapat adalah satu putusan yang memang dipersoalkan oleh masyarakat dan termasuk juga parlemen, berarti ada big question terhadap putusan itu," lanjutnya.

Patrialis juga menjelaskan bahwa dalam konteks ini terdapat tiga putusan MK terkait Pemilu. Dua di antaranya telah dilaksanakan tanpa masalah dan justru menjadi dasar bagi pemilu-pemilu sebelumnya yang menghasilkan para pemimpin bangsa.

"Nah, dalam masalah ini ada tiga putusan. Sedangkan dua putusan terdahulu tidak ada masalah. Bahkan itu sudah dilakukan. Dan itu sudah menjadi bagian menghasilkan pemimpin-pemimpin negara ini, baik di eksekutif maupun di legislatif. Kita pakai putusan MK yang masa lalu. Pada 2013 itu saya ikut memutuskan pemilu serentak itu," pungkasnya.

Menanggapi putusan MK ini, Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, juga mengatakan bahwa putusan MK kadang dibenci dan kadang dicinta. Begitu juga soal Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Dia menyerahkan tindak lanjut putusan tersebut kepada pembentuk undang-undang (UU), yaitu DPR dan pemerintah. (rls/lut)

# SONAR IDENTIFIKASI DIDUGA BANGKAI KMP TUNU DI KEDALAMAN 50 METER

**Pencarian Kapal Muatan Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya yang hilang di Selat Bali sejak Kamis (2/7/2025) terus dilakukan. Sonar Polairud menemukan dugaan bangkai kapal di kedalaman 50 meter.**

**P**encarian korban KMP Tunu Pratama Jaya pada hari keempat, Minggu (6/7/2025), tak hanya melakukan penyisiran ke tiga titik sektor pencarian korban, tapi juga untuk observasi benda diduga bangkai kapal KMP Tunu Pratama Jaya.

Menurut Kepala Basarnas, Laksamana Muda TNI (Purn) Ribut Eko Suyatno, secara data mentah lokasi diduga bangkai kapal begeser sekitar 800 meter dari lokasi kecelakaan kapal. Sebelumnya, benda diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya itu ditemukan sekitar 1-2 nautical miles ke arah utara dari titik awal tempat kapal tenggelam. Lokasinya berada di kedalaman antara 40-50 meter dari permukaan laut.

"Secara data mentah dari lokasi yang saya sampaikan kemarin bergeser dari lokasi kecelakaan kapal ke lokasi terbaru kurang lebih 800 meter," kata Ribut.

Ia menjelaskan pihaknya belum bisa memastikan kemungkinan para korban yang belum ditemukan berada di dalam kapal. Karena itulah, perlu dilakukan observasi bawah air dengan alat dan penyelam. "Itu belum bisa kami pastikan," tegasnya.

Ribut menerangkan, untuk tim penyelam dalam penanganan KMP Tunu Pratama Jaya, juga terus ditambah. Semula, ada 22 tim penyelam yang telah melakukan tes Medical Check Up (MCU) di RS Blambangan.

Hasilnya, tak semua bisa melakukan penyelaman, dan sisanya akan menjadi tenaga pendukung. Kemudian ada tambahan bantuan penyelam dari TNI AL sebanyak 15 orang. "Pertambahan kekuatan ada dari Panglima Armada, gugus keamanan laut yang akan mem-back up keamanan kapal yang lalu lintas," pungkasnya.

## Masalah Kelalaian Manusia hingga Alam

Pakar transportasi laut dan Dekan Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Setyo Nugroho, menyebut faktor manusia bertanggung jawab paling besar atas mayoritas kecelakaan kapal di Indonesia.

"Hampir 90% kecelakaan kapal terjadi karena kelalaian manusia," kata Setyo sebagaimana dikutip dari situs universitas tersebut.

Alumnus Magister Delft University of Technology, Belanda ini juga mengatakan kelalaian berwujud dari mulai kurangnya pemeliharaan pada mesin sampai dengan tidak dilakukannya perhitungan stabilitas muatan.

"Dari faktor kelalaian manusia

tersebut, sebanyak 80%-nya terjadi karena muatan yang tidak ditangani dengan benar," ujar Setyo.

Meski begitu peran cuaca ekstrem juga tidak dapat diabaikan. "Cuaca yang tidak stabil menyebabkan tingginya gelombang air laut yang membahayakan kapal,"

Oleh karena itu katanya adalah penting untuk mengevaluasi standar operasional pelayaran, termasuk prosedur pemuatan, perawatan kapal, hingga pengelolaan navigasi.

Tidak hanya itu, sistem manajemen muatan pun perlu diperbaiki agar setiap kapal memuat sesuai kapasitas dan stabilitasnya

diperhitungkan secara akurat.

Senada, Dosen teknik perkapalan ITS, Hasanudin, mengatakan dari segi umur, kapal ini sebenarnya masih layak beroperasi. Tapi perlu dicek juga apakah kapal ini 'fit' untuk berlayar.

"Kurang fit itu misalnya terjadi kebocoran, kemudian kurang stabil. Faktor lainnya yang bisa menyebabkan kecelakaan misalkan kapal bisa kelebihan muatan," katanya. Tapi yang harus dihitung juga adalah faktor alam, terangnya.

"Di selat itu [Selat Bali], ombaknya lumayan besar. Dan itu berhubungan dengan Samudra Hindia di sebelah timur." (wi,ama,ant,ist/dya)



Proses evakuasi satu orang jenazah yang ditemukan di Selat Bali oleh KRI Pulau Fanildo dan dibawah KRI Tongkol di Dermaga Pusti, Ketapang, Banyuwangi, Minggu (6/7/2025). Ist

## Hari Keempat Pencarian: 30 Selamat, 7 Tewas dan 28 Belum Ditemukan



Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menemui keluarga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Posko Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Minggu (6/7/2025).ist

**PENCARIAN** puluhan korban kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali terus berlanjut di hari keempat, Minggu (6/7/2025).

Tim SAR gabungan hari ini menemukan satu orang penumpang dalam kondisi meninggal dunia di wilayah selatan Selat Bali.

Dengan ditemukannya satu orang korban meninggal pada hari keempat pencarian ini, jumlah korban meninggal bertambah menjadi tujuh orang. Selain itu, 30 orang ditemukan selamat dan 28 orang masih dalam pencarian.

Saat ini Tim SAR gabungan bersiap melakukan penyelaman ke bangkai kapal. Namun, operasi penyelaman masih menunggu proses finalisasi data hidrografi yang sedang diolah oleh tim dari KRI Fanildo dan pakar hidrografi.

"Kita sudah mendapat arahan dan mengevaluasi dari datum yang kemarin dengan menunggu hasil data dari kapal KRI Fanildo dan tim expert dari hidrografi untuk menjadi lebih jelas lagi," kata Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, Laksamana Muda TNI Ribut Eko Suyatno, di Banyuwangi Minggu (6/7/2025).

Menurut Ribut, KRI Fanildo kembali akan menuju lokasi untuk menurunkan ROV (remotely operated vehicle) sekaligus mengumpulkan data visual bawah laut. Secara paralel, para penyelam profesional juga tengah menyiapkan

perlengkapan serta kondisi mental sebelum terjun ke dalam laut.

Selain itu, pihak Basarnas juga menyiapkan sebuah kapal tender yang serupa dengan KMP Tunu untuk mendukung operasi penyelaman. Jika seluruh persiapan rampung dan kondisi mendukung, penyelaman bisa segera dilakukan hari ini.

"Kita akan lakukan dengan memperhatikan faktor safety lingkungan dan tidak mengganggu transportasi yang ada," tegas Ribut.

Hingga hari keempat, belum ada lagi tambahan korban yang ditemukan. Ribut menyatakan hal itu memunculkan dugaan adanya korban yang terjebak di dalam badan kapal. Namun dugaan itu perlu dibuktikan melalui observasi bawah laut.

"Peluang [korban terjebak di badan kapal] itu bisa saja terjadi. Saya menyampaikan mungkin patut diduga. Saya belum bisa memastikan," kata dia. "Itu bisa pasti manakala observasi bawah air dengan ROV sudah kita dapatkan. Kemudian kita menurunkan penyelam, mengobservasi secara fisik langsung di palka-palka dan di benda barang yang ada di situ. Karena penyelam harus turun mengecek palka-palka dan ruangan-ruangan di dalam kapal tersebut," tambahnya. (wid,rls,ant/dya)

# Uji Kelayakan dan Kecepatan Calon Dubes Selesai KOMISI I DPR AKUI ADA YANG REKAM JEJAKNYA KURANG BAIK

Komisi I DPR RI selesai menggelar fit and proper test 24 calon duta besar (dubes) RI selama dua hari, Sabtu (5/7/2025) dan Minggu (6/7/2025). Ada beberapa nama yang dinilai kurang tepat karena memiliki rekam jejak yang kurang baik.

**K**etua Komisi I DPR RI, Utut Adianto menyatakan tidak ada persoalan besar dalam proses uji kelayakan dan kecepatan (fit and proper test) dari 24 calon duta besar RI yang akan mengisi posisi kosong di sejumlah negara sahabat.

"Dugaan saya nggak ya, sebab kalau ada, ada debat-debat panjang," kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Minggu (6/7/2025).

Akan tetapi, Utut mengakui bahwa dari 24 nama yang diajukan, ada beberapa nama yang dinilai kurang tepat karena memiliki rekam jejak yang kurang baik.

"Tapi kalau satu dua yang nggak pas, namanya manusia. Dalam berhubungan pasti pernah ada kekeliruan," jelasnya.

Akan tetapi, menurut Utut hal tersebut bukan permasalahan signifikan. Menurutnya, jika ada masalah yang tergolong besar, tentu akan muncul perdebatan panjang dalam uji kelayakan dan kecepatan.

"Nanti kita buat tabel, mana yang masih cocok semua, mana yang dianggap belum. Kalau yang belum, apakah itu berpotensi fatal atau tidak. Tapi sejauh ini, yang saya lihat, kalau ini dianggap bocoran, semuanya oke," imbuhnya.

Utut juga mengungkapkan bahwa tidak ada indikator atau kriteria khusus dalam proses uji kelayakan terhadap para calon dubes kali ini. Menurutnya, hal itu disebabkan karena setiap fraksi di DPR memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menilai para calon.

"Setiap fraksi punya yang di-underline-kan. Diberi kesempatan masing-masing fraksi tiga menit, tiga menit, tiga menit. Tentu sudut pandang fraksi PDIP, misalnya, berbeda dengan teman-teman di Gerindra dan Golkar," tukasnya.

Sebelumnya, Komisi I DPR kembali menggelar uji kelayakan dan kecepatan bagi 12 duta besar Indonesia untuk sejumlah negara sahabat. Kegiatan tersebut akan digelar di ruang rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat hari ini, Minggu (6/7/2025).

Sebelumnya, pada Sabtu (5/7/2025), Komisi I juga telah melakukan uji kelayakan dan kecepatan terhadap 12 calon duta besar lainnya. Dengan demikian, total

ada 24 calon duta besar RI yang akan menduduki jabatan masing-masing.

Setelah 24 calon duta besar ini selesai menjalani uji kelayakan dan kecepatan, Komisi I akan segera menggelar rapat internal untuk menyimpulkan hasil uji kelayakan dan kecepatan. Hasilnya akan disampaikan kepada pimpinan DPR RI.

"Kami laporkan bahwa sekarang sudah selesai semua calon dubes yang mengikuti fit and proper test 24 orang sudah lengkap dan sudah mengikuti fit and proper test ini," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Budi Djiwandono di gedung DPR RI, Jakarta, Minggu (6/7/2025).

Budi menjelaskan sudah menjalankan rapat internal komisi terkait hasil fit and proper test tersebut. Menurut dia, hasil rapat internal tersebut akan disampaikan ke pimpinan DPR.

"Kami juga sudah menjalankan rapat internal komisi, di mana dalam rapat tersebut kami akan memberikan tanggapan jawaban kepada pimpinan DPR untuk seterusnya nanti akan melanjutkan proses," katanya.

"Dan saya rasa hasil rapat internal

tersebut kalau tidak hari ini mungkin besok akan dikirim kepada pimpinan DPR RI," sebut dia.

Budi menjelaskan bahwa para calon dubes tersebut memiliki kualitas yang baik. Dirinya secara pribadi merasa puas atas kualitas para calon dubes tersebut.

"Saya yakin bahwa pilihan-pilihan pemerintah, pilihan Presiden Republik Indonesia sudah melalui evaluasi dan pertimbangan yang matang," sebutnya.

Dari 24 daftar calon dubes yang dipilih Presiden Prabowo Subianto untuk mengikuti uji kelayakan dan kecepatan (fit and proper test) di DPR RI, dua di antaranya adalah Purnawirawan. Keduanya adalah Letjen (Purn) Hotmangaraja Panjaitan dan Mayjend (Purn) Gina Yoginda.

"Beliau itu dulu Letnan Jenderal TNI. Jadi kalau dari petinju, ini kelas berat semua. Heavyweight, bukan kelas yang mayang yang 48 kilo," ujar Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto.

Diketahui, selain pensiunan TNI, Hotmangaraja adalah anak dari D.I.



Calon duta besar (dubes) Republik Indonesia untuk Malaysia, Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo

## Mantan TKN Prabowo Jadi Calon Dubes Malaysia

**CALON** duta besar (dubes) Republik Indonesia untuk Malaysia, Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan kedekatannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga membenarkan bahwa dirinya adalah eks Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

"Alhamdulillah saya dekat dengan Prabowo juga," ujar Iman saat ditemui usai mengikuti fit and proper test di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (6/7/2025).

Di antaranya penugasan diplomatik ini sebagai upaya untuk melanjutkan dan memelihara

hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia yang sudah terjalin selama ini. "Jadi untuk menjaga hubungan yang sudah dibina baik dengan Presiden, kita hanya melanjutkan, memelihara lah," kata Iman.

Meskipun bukan dari jalur diplomatik karier, Iman mengaku memiliki pengalaman tinggal di Malaysia cukup lama dan memiliki kedekatan kultural dengan negeri jiran tersebut. "Jadi saya tinggal di Malaysia cukup lama dan menikah dengan orang Malaysia. Mungkin jalan hidup aja ya seperti begitu," katanya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budi Djiwandono

Panjaitan, seorang pahlawan revolusi.

Tak hanya itu, ia juga pernah menjabat asisten khusus menteri pertahanan bidang lingkungan strategis pada 2019. Saat itu, Prabowo menjabat menteri pertahanan. (wid,rls,ant/dya)

### DAFTAR LENGKAP 24 CALON DUBES TERSEBUT:

#### Fit and proper test Sabtu (5/6)

1. Abdul Kadir Jaelani, Dubes RI untuk Jerman (Berlin)
2. Redianto Heru Nurcahyo, Dubes RI untuk Slovakia (Bratislava)
3. Umar Hadi, PTRI New York
4. Hotmangaraja Panjaitan, Dubes RI untuk Singapura
5. Nurmala Kartini Sjahrir, Dubes RI untuk Jepang (Tokyo)
6. Indroyono Soesilo, Dubes RI untuk Amerika Serikat (Washington DC)
7. Adam Mulawarman Tugio, Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi)
8. Laurentius Amrih Jinangkung, Dubes RI untuk Belanda (Den Haag)
9. Judha Nugraha, Dubes RI untuk Uni Emirat Arab (Abu Dhabi)
10. Sidharto Reza Suryodipuro, Perwakilan RI di Kantor PBB di Swiss (Jenewa)
11. Andhika Christnayudhanto, Dubes RI untuk Brazil (Brasilia)
12. Syahda Guruh Langkah Samudera, Dubes RI untuk Qatar (Doha)

#### Fit and proper test Sabtu (5/6)

1. Andi Rahardian, Dubes RI untuk Oman (Muscat)
2. Imam As'ari, Dubes RI untuk Ekuador (Quito)
3. Listyowati, Dubes RI untuk Bangladesh dan Nepal (Dhaka)
4. Kuncoro Giri Waseso, Dubes RI untuk Mesir (Kairo)
5. Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo, Dubes RI untuk Malaysia (Kuala Lumpur)
6. Mayjen (Purn) Gina Yoginda, Dubes RI untuk Korea Utara (Pyongyang)
7. Yusron Bahauddin Ambary, Dubes RI untuk Algeria (Alger)
8. Lukman Hakim Siregar, Dubes RI untuk Suriah (Damascus)
9. Berlian Helmy, Dubes RI untuk Ajerbaizan (Baku)
10. Hari Prabowo, Dubes RI untuk Thailand (Bangkok)
11. Okto Dorinus Damanik, Dubes RI untuk Papua Nugini (Port Moresby)
12. Andi Rachmianto, Dubes RI untuk Belgia (Brussel)

menegaskan bahwa Komisi I tidak menilai calon duta besar berdasarkan latar belakang politik seperti yang dimiliki mantan Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Raden Dato Mohammad Iman Hascarya, yang kini menjadi calon dubes RI untuk Malaysia.

"Kami tidak melihat seperti itu ya. Kita melihat seluruh calon duta besar yang diajukan mempunyai kapasitas, jam terbang, track record yang baik," kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (6/7/2025).

Budi menambahkan, dalam uji kelayakan dan kecepatan yang berlangsung selama dua hari, Komisi I menilai calon dubes berdasarkan pengalaman dan kemampuan jaringan yang dimiliki untuk menjalankan tugas diplomatik. (wid,rls,ist/dya)

# Cabor Bela Diri Bakal Dievaluasi Usai Porprov, Ada Apa?

**MALANG** - Hasil Pekan Olahraga Provinsi (Poprov) IX Jatim 2025 mencatat sejumlah cabang olahraga (cabor) bela diri Kota Malang masuk dalam daftar evaluasi. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Baihaqi, menyebut capaian medali karate dan silat belum sesuai harapan, meski jumlah nomor yang dipertandingkan cukup banyak.

"Ada beberapa cabor yang akan kami sampaikan ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan bersama kami evaluasi lebih intens. Untuk cabor-cabor bela diri seperti karate dan silat, itu nomornya banyak. Tapi dari laporan yang kami terima, hasilnya belum bisa mencapai target. Ini harus kami evaluasi betul," ujarnya, Minggu (6/7/2025).

Menurutnya, dengan jumlah nomor pertandingan yang cukup besar, seharusnya Kota Malang bisa memperoleh medali lebih banyak dari cabor tersebut. Namun kenyataan di lapangan, menurutnya menunjukkan hasil yang belum memuaskan.

Pada, sambung Baihaqi, jika dibandingkan dengan cabor bela diri lainnya, sejumlah cabor unggulan Kota

Malang seperti hapkido, wushu, dan kempo mampu meraih medali emas sesuai bahkan melampaui target.

Cabor hapkido, misalnya, dikatakan mampu menyabet delapan emas dan dua perak, dari target lima medali emas. "Wushu juga melampaui target dengan raihan tujuh medali emas dari target lima. Sementara itu, cabor kempo menyumbang delapan medali emas,"

Di sisi lain, karate sebagai salah satu cabor bela diri yang juga memiliki banyak nomor pertandingan, justru hanya mampu menyumbangkan satu medali emas dan satu medali perak pada Porprov Jatim IX ini. "Karena nomor seperti ini harusnya Kota Malang bisa lebih kuat," tambah Baihaqi.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari laman resmi porprovjatim.com, Kota Malang menempati posisi kedua dalam klasemen akhir Porprov Jatim IX 2025. Total perolehan medali kontingen Kota Malang adalah 137 emas, 124 perak, dan 116 perunggu. Posisi pertama ditempati oleh Kota Surabaya dengan 195 medali emas.

Di sisi lain, tak hanya melakukan

evaluasi cabor yang belum mencapai target, Pemkot Malang juga akan memperkuat cabor-cabor yang diproyeksikan sebagai lumbung emas di gelaran Porprov Jatim berikutnya. Di antaranya, yakni cabor atletik dan renang selam.

Dengan jumlah nomor pertandingan yang cukup banyak dan didukung sarana yang memadai. Baihaqi optimistis atletik dan renang selam memiliki peluang besar untuk mendulang medali di Porprov mendatang.

"Untuk atletik, kami sudah punya sarana yang memadai. Nomor yang dipertandingkan ada 46. Kemudian cabor renang dan selam itu kurang lebih ada 50 nomor. Jadi kurang lebih ada 100 lebih nomor yang harus kami maksimalkan," katanya.

Ditambahkannya, potensi dari



Cabor karate di Porprov IX Jatim 2025. (Santi/Lentera)

kedua cabor tersebut dinilai sangat besar. Oleh karena itu, pembinaan usia dini akan menjadi salah satu strategi yang akan diperkuat untuk mempersiapkan atlet secara optimal.

"Kami harus lakukan pembinaan sejak dini, sehingga atletik dan renang selam ini harusnya bisa menjadi lumbung emas. Karena kami sudah punya sarannya," terang Baihaqi. (Santi/Dya)

## Ikan Layur Primadona Ekspor ke Cina

# Tangkapan di Kabupaten Malang Capai 10 Ribu Ton/Tahun



Jalan Raya Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. (dok. Ist)

sebagai sentra penghasil layur terbesar di daerah tersebut.

"Layurnya kita itu kurang lebih per bulan sekitar 900 ton per bulan. Ya, (hasil tangkapan) terbesar adalah layur. 900 ton dikalikan 12 (bulan), ya berarti sekitar 10.800 ton per tahun," ujar Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang, Victor Sembiring, dikutip pada Minggu (6/7/2025).

Menurut Victor, angka tangkapan ikan layur yang signifikan tersebut menjadikan komoditas

ini menempati posisi tertinggi. Dibanding jenis ikan tangkap lainnya di wilayah pesisir selatan.

"Ya, total semuanya cukup tinggi. Per tahun, hasil tangkap ikan seperti tongkol, ikan lemuru, dan sebagainya, masing-masing bisa mencapai 5.500 ton," katanya.

Secara keseluruhan, Victor

menyebut total produksi tangkap laut di Kabupaten Malang pada tahun 2024 tercatat sebanyak 20.729,40 ton.

Sementara untuk target produksi tahun 2025 ini, pihaknya menargetkan kenaikan menjadi 21.351,28 ton. Di mana pada musim panen puncak, jumlah tangkapan ikan laut bahkan bisa mencapai 2.000 hingga 3.000 ton per bulan.

Lebih lanjut, Victor juga menyampaikan penghasil utama ikan layur berada di Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo. Di kawasan ini, menurutnya aktivitas nelayan berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh tingginya nilai jual ikan layur dan permintaan pasar luar negeri.

"Harganya cukup bagus, sekitar Rp50 ribuan per kilogram. Jadi nelayan juga bisa merasakan manfaatnya langsung," tutur Victor.

Selama ini, dikatakannya ikan layur hasil tangkapan nelayan setempat dikirim dalam bentuk segar (gelondongan) ke Cina sebagai negara tujuan ekspor utama.

Guna meningkatkan nilai tambah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab)

Malang bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah merancang pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Pantai Sipelot, Desa Pujiharjo.

"Bisa juga nanti Koperasi Merah Putih (KMP) akan berperan sebagai off-taker hasil tangkapan nelayan. Mereka juga bisa melakukan pengolahan seperti pembersihan dan pembekuan sebelum dikirim ke eksportir," jelasnya.

Victor menyebutkan, usulan pembangunan KNMP sudah diverifikasi dan disetujui oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Fasilitas ini nantinya akan melengkapi kebutuhan dasar nelayan. Meskipun saat ini masih ada beberapa kekurangan seperti cold storage dan kendaraan pengangkut berpendingin.

Pemkab Malang juga akan melengkapi proyek ini dengan pembangunan pelengsangan ke laut. Guna mencegah pasir menutupi akses masuk ke kawasan pantai. Selain itu, menurutnya, jalan menuju Pantai Sipelot akan diperlebar dan diperbaiki agar mendukung kelancaran distribusi hasil perikanan. (Santi/Dya)

# ELON MUSK BENTUK "AMERICA PARTY", TANTANG DOMINASI TRUMP

**Ketegangan antara Presiden dari Partai Republik, Donald Trump, dan pendonor utama kampanyenya, Elon Musk, memuncak menjadi konflik terbuka pada Sabtu (5/7/2025), setelah miliarder di bidang luar angkasa dan otomotif itu mengumumkan pendirian partai politik baru. Musk menilai bahwa RUU pajak besutan Trump yang disebut "besar dan indah" justru berisiko membuat Amerika mengalami kebangkrutan.**

Satu hari setelah melempar pertanyaan kepada para pengikutnya di platform X tentang perlunya membentuk partai politik baru di AS, Elon Musk menyatakan melalui unggahan pada Sabtu bahwa, "Hari ini, America Party resmi dibentuk untuk mengembalikan kebebasan Anda."

"Dengan faktor 2 banding 1, Anda menginginkan partai politik baru dan Anda akan mendapatkannya!" tulisnya.

"Jika menyangkut pemborosan dan korupsi yang membuat negara kita bangkrut, kita hidup dalam sistem satu partai, bukan demokrasi. Hari ini, Partai Amerika dibentuk untuk mengembalikan kebebasan Anda," ungkapnya.

Pengumuman dari Musk muncul setelah Trump menandatangani rancangan undang-undang pemotongan pajak dan pengeluaran yang "besar dan indah" menjadi undang-undang pada hari Jumat, yang ditentang keras oleh Musk.

Musk, yang menjadi orang terkaya di dunia berkat perusahaan mobil Tesla dan perusahaan satelit SpaceX miliknya, menghabiskan ratusan juta untuk pemilihan kembali Trump dan memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah sejak awal masa jabatan kedua presiden yang bertujuan untuk memangkas pengeluaran pemerintah.

Tanda pertama ketidakpuasan investor terhadap pengumuman Musk muncul kemudian pada hari itu.

Perusahaan investasi Azoria Partners akan menunda pencatatan dana yang diperdagangkan di bursa Tesla, kata CEO Azoria James Fishback dalam sebuah posting di X.

Fishback meminta dewan Tesla untuk mengklarifikasi ambisi politik Musk dan mengatakan partai baru tersebut merusak kepercayaan pemegang saham bahwa ia akan lebih fokus pada perusahaan setelah meninggalkan dinas pemerintah pada bulan Mei.

Musk mengatakan sebelumnya bahwa ia akan memulai partai politik baru dan menghabiskan uang untuk melengserkan anggota parlemen yang mendukung RUU tersebut.

Trump awal minggu ini mengancam akan memotong subsidi miliaran dolar yang diterima perusahaan Musk dari pemerintah federal.

Partai Republik telah menyatakan kekhawatiran bahwa perseteruan Musk dengan Trump dapat merusak

Elon Musk pada hari Sabtu tampaknya mengonfirmasi niatnya untuk meluncurkan "America Party" miliknya, setelah mengunggah jajak pendapat ke akun X miliknya pada hari sebelumnya, menanyakan kepada para pengikutnya apakah ia harus membuat partai baru tersebut atau tidak. (Getty Images)

peluang mereka untuk melindungi mayoritas mereka dalam pemilihan kongres sela tahun 2026.

Ketika ditanya di X tentang satu hal yang membuatnya berubah dari mencintai Trump menjadi menyeringnya, Musk berkata "Meningkatkan defisit dari \$2 triliun yang sudah gila di bawah Biden menjadi \$2,5 triliun. Ini akan membuat negara bangkrut."

Belum ada komentar langsung dari Trump atau Gedung Putih terkait pengumuman Musk.

Perseteruan dengan Trump, yang sering digambarkan sebagai perseteruan antara orang terkaya di dunia dan orang paling berkuasa di dunia, telah menyebabkan beberapa kali penurunan tajam dalam harga

saham Tesla.

Saham tersebut melonjak setelah terpilihnya kembali Trump pada bulan November dan mencapai titik tertinggi lebih dari \$488 pada bulan Desember, sebelum kehilangan lebih dari setengah nilainya pada bulan April dan ditutup minggu lalu pada \$315,35.

Meskipun Musk punya banyak uang, memutus duopoli Republik-Demokrat akan menjadi tugas berat, mengingat duopoli tersebut telah mendominasi kehidupan politik Amerika selama lebih dari 160 tahun, sementara tingkat persetujuan Trump dalam jajak pendapat pada masa jabatan keduanya secara umum tetap kokoh di atas 40%, meskipun kebijakannya sering kali memecah belah. (Reuters, Aljazeera, ist/nei)

## Banyak Parpol di AS, Hanya Dua Partai Kuasai Pemilu



Ketua DPR Mike Johnson, R-La., tengah berjabat tangan dengan Pemimpin Mayoritas Steve Scalise, R-La., saat ia merayakan bersama sesama anggota Partai Republik setelah pengesahan akhir RUU keringanan pajak dan pemotongan belanja Presiden Donald Trump, di Capitol di Washington, Kamis, (3/7/2025). (Foto AP)

**PARA** pendukung sistem dua partai berpendapat bahwa keberadaan dua partai utama justru membantu menjaga stabilitas politik dan mendorong terciptanya kompromi, karena masing-masing partai perlu merangkul berbagai kelompok dalam spektrum politik yang luas demi memperoleh dukungan luas dari pemilih.

Misalnya, di dalam Partai

Republik sendiri terdapat berbagai spektrum politik dari konservatif moderat hingga sayap kanan yang lebih ekstrem. Begitu juga di Partai Demokrat, terdapat tokoh-tokoh progresif di satu sisi, dan kelompok moderat di sisi lainnya.

Perbedaan kebijakan umum antara Demokrat dan Republik

Secara garis besar, Partai Republik (dikenal juga sebagai GOP atau Grand Old Party) mematuhi nilai-nilai konservatif.

Mereka mendukung kebebasan individu, pasar bebas tanpa banyak intervensi pemerintah, serta hak untuk memiliki senjata sebagaimana dijamin dalam Amandemen Kedua Konstitusi AS.

Isu-isu seperti anti-aborsi dan perlindungan nilai-nilai keluarga

tradisional juga menjadi sorotan utama partai ini.

Sementara itu, Partai Demokrat dikenal lebih progresif. Mereka mendukung peran besar pemerintah dalam menyediakan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan.

Mereka juga mendorong kesetaraan gender, hak aborsi, dan perlindungan terhadap kelompok LGBTQ+. Demokrat juga cenderung mendukung pengetatan regulasi kepemilikan senjata api.

Meskipun ada wacana reformasi sistem pemilu untuk memberi peluang lebih besar bagi partai-partai ketiga, kenyataannya struktur politik AS adalah sistem distrik pemilihan dan pendanaan kampanye yang masih sangat berpihak pada dua partai besar.

Dengan kondisi ini, kehadiran partai alternatif tetap mengalami kesulitan untuk memperoleh dukungan luas, apalagi memenangkan kursi legislatif atau eksekutif. (cnn, New York Times, ist/nei)

# Logam Alat Masak

## Pengaruh Kesehatan Tubuh

**D**alam memilih peralatan masak, kita kerap menjumpai beragam pilihan bahan logam seperti aluminium, stainless steel, besi cor, tembaga, hingga kuningan. Masing-masing bahan tersebut memiliki sifat khas yang memengaruhi proses memasak, mulai dari kemampuan menghantarkan panas, ketahanan terhadap reaksi kimia, hingga tingkat kemudahan dalam perawatannya.

Tidak hanya soal fungsi, memilih jenis logam yang tepat untuk peralatan masak juga berdampak pada kesehatan. Beberapa logam dapat bereaksi dengan makanan dan berpotensi melepaskan zat-zat yang berbahaya ke dalam masakan.

Oleh karena itu, penting untuk memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing bahan agar dapat memilih peralatan masak yang tidak hanya fungsional, tetapi juga aman dan tahan lama.

Dalam dunia kuliner, pemilihan peralatan masak tidak hanya soal kenyamanan, tetapi juga berkaitan erat dengan hasil akhir masakan. Misalnya, beberapa logam memiliki kemampuan menghantarkan panas dengan cepat dan merata, yang sangat berguna untuk memasak dengan suhu tinggi, sementara logam lain lebih tahan lama dan tidak mudah tergores, menjadikannya pilihan ideal untuk penggunaan jangka panjang.

Selain itu, faktor seperti reaktivitas logam dengan makanan juga harus diperhitungkan. Beberapa bahan dapat bereaksi dengan makanan asam

atau basa, yang dapat memengaruhi cita rasa makanan atau bahkan menyebabkan paparan zat berbahaya jika digunakan dalam jangka panjang.

Dengan memahami karakteristik setiap jenis logam yang umum digunakan dalam peralatan masak, Anda dapat membuat pilihan yang lebih cerdas dan sesuai dengan kebutuhan memasak sehari-hari.

Berikut ini adalah berbagai jenis logam yang umum digunakan dalam peralatan masak, lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya, guna membantu Anda memilih bahan yang paling cocok untuk kebutuhan dapur dan gaya memasak Anda.

### Tembaga

Tembaga dikenal sebagai konduktor panas yang sangat baik, memastikan pemanasan merata tanpa titik panas yang dapat merusak tekstur atau rasa masakan. Logam ini juga dapat menstabilkan makanan tertentu, seperti putih telur dan saus berbasis krim, sehingga hasil akhirnya lebih halus dan konsisten. Tidak heran jika banyak koki profesional memilih tembaga untuk teknik memasak yang memerlukan kontrol suhu presisi.

Namun, tembaga membutuhkan perawatan ekstra karena sifatnya yang mudah tergores dan penyok, serta harus sering dipoles agar tetap mengkilap dan tidak teroksidasi. Penggunaan yang ceroboh bisa membuat warnanya kusam atau bahkan meninggalkan noda. Harganya juga relatif mahal dibandingkan material lainnya, tetapi tembaga tetap menjadi pilihan.

### Aluminium

Aluminium adalah bahan yang ringan, terjangkau, dan memiliki konduktivitas panas yang baik. Namun, makanan asam atau basa dapat menyebabkan aluminium larut ke dalam makanan, sehingga banyak peralatan masak aluminium kini dilapisi dengan lapisan antilengket atau anodisasi.

Aluminium memanaskan makanan dengan cepat dan merata, lebih terjangkau dibandingkan bahan lain seperti stainless steel atau tembaga, serta mudah digunakan karena bobotnya yang ringan. Namun, bahan ini kurang mempertahankan panas sebaik besi cor atau tembaga, meskipun kelebihan utamanya adalah mendingin dengan cepat untuk mencegah makanan terlalu matang.

### Kuningan

Kuningan menawarkan kinerja memasak yang baik, tahan lama, serta memiliki tampilan estetik yang menarik. Logam ini menghantarkan panas dengan baik, memiliki sifat antimikroba alami dari kandungan tembaganya, dan tidak bereaksi kuat dengan makanan asam.

Selain itu, kuningan juga lebih ramah lingkungan karena dapat didaur ulang dan lebih berkelanjutan dibandingkan beberapa peralatan masak dengan lapisan kimia.

### Besi Cor

Besi cor telah digunakan selama berabad-abad karena kemampuannya menahan dan mendistribusikan panas secara merata. Setelah dipanaskan, besi cor mempertahankan suhu dengan sangat baik, menjadikannya ideal untuk memanggang, menggoreng, dan memasak dalam waktu lama. Selain itu, dengan proses seasoning yang tepat,

permukaannya dapat menjadi antilengket alami. Daya tahannya luar biasa, dan jika dirawat dengan baik, peralatan masak besi cor bisa bertahan puluhan tahun. Bahkan, memasak dengan besi cor dapat menambahkan sedikit kandungan zat besi ke dalam makanan.

### Stainless Steel

Stainless steel adalah pilihan populer karena daya tahannya, kemudahan perawatan, dan sifatnya yang tidak bereaksi dengan makanan. Material ini tahan terhadap karat, korosi, dan noda, menjadikannya ideal untuk penggunaan sehari-hari. Stainless steel juga tidak bereaksi dengan makanan asam sehingga rasa makanan tetap murni tanpa kontaminasi logam. Selain itu, tampilannya yang elegan membuat dapur terlihat lebih modern.

Peralatan masak berbahan stainless steel juga mudah dibersihkan dan tidak memerlukan perawatan khusus seperti besi cor atau tembaga, sehingga sangat praktis untuk rutinitas memasak yang padat. Banyak produk stainless steel saat ini dirancang dengan lapisan dasar berinti aluminium atau tembaga untuk meningkatkan konduktivitas panasnya, sehingga lebih efisien dalam mendistribusikan panas dan meminimalkan titik panas yang bisa membuat makanan gosong.

Memilih peralatan masak berbahan logam yang sehat bergantung pada kebutuhan, kebiasaan, dan gaya memasak Anda. Jika mengutamakan daya tahan serta kemudahan perawatan sehari-hari, stainless steel adalah pilihan terbaik. Namun, jika menginginkan pemanasan merata dan responsif untuk teknik memasak tertentu, tembaga atau kuningan bisa dipertimbangkan karena keduanya cepat menghantarkan panas. Sementara itu, bagi yang suka memasak dengan suhu tinggi atau memerlukan hasil masakan yang matang sempurna serta tahan lama, besi cor menjadi solusi ideal berkat kemampuannya menyimpan panas. (nei,ist/dya)

# FENOMENA LANGKA, GURUN TANDUS DISELIMUTI SALJU

**T**urunnya salju di Gurun Atacama, salah satu wilayah paling kering di dunia, menjadi fenomena langka yang turut menghentikan aktivitas salah satu jaringan teleskop tercanggih di planet ini. Para ilmuwan mengingatkan bahwa perubahan iklim berpotensi meningkatkan frekuensi peristiwa cuaca ekstrem seperti ini di masa mendatang.

Sebagian wilayah Gurun Atacama di utara Chili diselimuti salju, meskipun area ini umumnya hanya menerima curah hujan kurang dari satu inci per tahun. Di lokasi inilah berdiri Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), salah satu jaringan teleskop radio terbesar dan paling canggih untuk pengamatan astronomi di dunia.

Hujan salju kali ini terjadi di markas operasional ALMA, yang terletak di ketinggian sekitar 2.900 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan sekitar 1.700 kilometer di utara ibu kota Santiago. Sejak Kamis (26/6) seluruh aktivitas ilmiah di sana dihentikan sementara.

"Sudah lebih dari 10 tahun tidak ada catatan hujan salju di kamp utama. Salju bukan hal yang biasa di ALMA!" kata perwakilan ALMA, mengutip Live Science.

Jaringan teleskop radio ALMA sebenarnya berdiri di Dataran Tinggi Chajnantor, yang berada di ketinggian

5.100 meter di wilayah Antofagasta, Chili. Salju biasanya turun di dataran tinggi ini sekitar tiga kali dalam setahun. Fenomena terjadi pada dua musim, bulan Februari saat Musim Dingin Altiplano akibat angin lembap dari Amazon, dan dari Juni hingga Juli saat musim dingin belahan Bumi selatan.

Namun, wilayah kamp utama ALMA yang berada di ketinggian sekitar 3.000 meter jauh lebih jarang diselimuti salju.

"Hujan salju di atas 5.000 meter masih tergolong rutin, tapi di ketinggian 3.000 meter itu kejadian yang tidak biasa," jelas Raúl Cordero, ahli klimatologi dari University of Santiago.

Menurutnya, salju yang turun pekan ini disebabkan oleh ketidakstabilan atmosfer yang tidak biasa di Chili utara. Direktorat Meteorologi Chili bahkan mengeluarkan peringatan salju dan angin kencang karena adanya inti dingin yang melintasi wilayah tersebut.

"Kami mengeluarkan peringatan angin untuk wilayah Antofagasta dan sekitarnya, dengan hembusan mencapai 80 hingga 100 km/jam," kata ahli meteorologi Elio Brufort.

Fenomena ini juga memicu hujan lebat di wilayah yang lebih utara, menyebabkan luapan sungai yang merusak sejumlah properti. Beberapa

sekolah terpaksa ditutup, terjadi pemadaman listrik dan longsor di beberapa tempat. Untungnya, sejauh ini belum ada laporan korban jiwa. Kejadian cuaca ekstrem seperti ini belum pernah terjadi selama hampir satu dekade terakhir.

Hingga Jumat (4/7), ALMA mengonfirmasi badai salju masih aktif di atas Dataran Chajnantor. Oleh karena itu, operasional ilmiah masih dihentikan demi melindungi antena dari kondisi ekstrem. Observatorium bahkan mengaktifkan protokol keselamatan mode bertahan hidup karena suhu turun drastis hingga -12°C, dan dengan hembusan angin ekstrem suhu terasa bisa mencapai -28°C.

Sebagai bagian dari protokol itu, seluruh antena besar ALMA diarahkan mengikuti arah angin untuk meminimalkan kerusakan akibat tumpukan salju atau terpaan angin kencang.

"Begitu badai mereda, tim pembersih salju langsung dikerahkan untuk memeriksa setiap antena secara visual sebelum observasi dilanjutkan," jelas perwakilan ALMA. "Ini harus

dilakukan secepat mungkin karena kondisi terbaik untuk pengamatan justru muncul setelah salju turun, udara yang dingin membuat kelembapan menurun, dan itulah yang paling memengaruhi kualitas pengukuran kami."

ALMA adalah kolaborasi internasional dengan 66 antena berpresisi tinggi yang tersebar di Dataran Tinggi Chajnantor. Teleskop ini memang dirancang untuk tahan terhadap cuaca ekstrem, namun kenyataan bahwa hujan salju bisa menghentikan operasionalnya tetap menjadi peringatan, terutama di tengah krisis iklim global. (nei,ist/dya)



HARIAN  
**LENTERA**  
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"  
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI  
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)  
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)  
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY  
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)  
download edisi digital pada web  
[www.lenteratoday.com](http://www.lenteratoday.com)  
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS  
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



**BIRO: SURABAYA:** YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO ( SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

**MEDIA TERVERIFIKASI**

**PENASEHAT HUKUM** DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH  
**DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL.

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

# Gen Z Jadikan Sneakers Simbol Ekspresi Diri

**G**enerasi Z dikenal memiliki gaya fashion yang penuh keberanian dan ekspresi diri. Hal ini tercermin dalam tren sneakers yang mereka ikuti, yang hadir dalam berbagai pilihan model tanpa terikat pada satu gaya saja. Lantas, seperti apa tren sneakers yang tengah digemari Gen Z?

Bagi Gen Z, sneakers bukan sekadar pelindung kaki, melainkan representasi dari jati diri dan cara mereka mengekspresikan diri. Mereka dengan bebas mengombinasikan beragam gaya dan merek untuk menciptakan penampilan yang khas dan mencerminkan kepribadian masing-masing.

Di sisi lain, Gen Z menunjukkan kepedulian yang makin besar terhadap isu sosial dan lingkungan. Kepedulian ini terlihat dari kecenderungan mereka memilih

sneakers yang mengedepankan aspek keberlanjutan dan ramah terhadap lingkungan.

## Klasik dengan Sentuhan Modern

Sneakers klasik seperti Nike Air Force 1, Converse, dan Adidas Samba tetap menjadi favorit di kalangan Gen Z. Mereka memadukannya dengan outfit yang unik dan modern untuk menciptakan tampilan yang stylish dan personal. Warna-warna netral seperti putih dan hitam tetap populer, tetapi warna-warna cerah dan mencolok juga banyak diminati.

Salah satu cara Gen Z memodifikasi sneakers klasik adalah dengan menambahkan aksesoris seperti tali sepatu berwarna-warni, gantungan kunci, atau lukisan tangan. Mereka juga sering mengubah bentuk sneakers dengan memotong bagian-bagian tertentu atau menambahkan detail baru.

Selain itu, kolaborasi antara merek sneakers klasik dengan desainer atau seniman muda juga menjadi daya tarik tersendiri bagi Gen Z. Kolaborasi ini menghasilkan sneakers dengan desain yang unik dan terbatas, sehingga menjadi barang koleksi yang bernilai.

## Sneakers "Chunky" atau "Dad Shoes"

Penampakan Sneaker Yeezy Terbaru yang Dibilang Mirip Pangsit, Semirip Apa? Melihat penampilan sneaker Yeezy yang disebut mirip dengan pangsit (adidas). Sneakers dengan sol tebal dan desain yang sedikit "gembul" ini memberikan kesan edgy dan trendi.

Model ini nyaman dipakai dan mudah dipadukan dengan berbagai outfit, mulai dari jeans hingga rok. Gen Z menyukai sneakers jenis ini karena memberikan tampilan yang berbeda dan menarik perhatian. Sneakers chunky atau dad shoes awalnya dipopulerkan oleh merek-merek high-end seperti Balenciaga dan Gucci.

Namun, kini banyak merek sneakers lain yang juga mengeluarkan model serupa dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini membuat sneakers jenis ini semakin mudah diakses oleh Gen Z.

## Sneakerina

Salah satu inovasi paling menarik tahun ini adalah munculnya sneakerina, yaitu sepatu yang memadukan siluet balet klasik dengan desain sneaker modern. Model ini sudah diperkenalkan oleh beberapa brand global seperti Louis Vuitton, Adidas, dan Puma yang menghadirkan varian bergaya feminin namun tetap sporty.

Tren ini merefleksikan keinginan konsumen masa kini yang mendambakan sepatu ringan, fleksibel, dan nyaman untuk dikenakan sehari-hari, tanpa harus mengorbankan unsur estetika. Sneakerina diprediksi akan menjadi pilihan utama bagi para profesional muda dan pengguna urban yang mencari keseimbangan antara gaya dan mobilitas.

## Slim Sneakers

Berbeda dari tren bulky sneaker yang sempat populer beberapa tahun terakhir, tahun ini industri beralih ke desain sepatu yang lebih ramping dan bersih. Slim sneakers dengan warna netral dan bentuk low-cut menjadi favorit baru karena bisa dikenakan dalam berbagai suasana—dari aktivitas kasual hingga acara semi-formal. Bahan yang digunakan pun makin bervariasi, dari kulit premium, kanvas ramah lingkungan, hingga material tekstil daur ulang. Gaya ini menjadi refleksi dari tren global yang mengarah ke quiet luxury dan desain berkesan "invisible elegance".

## Desain Unik dan Inovatif

Gen Z menyukai sneakers dengan desain yang tidak biasa, seperti sneakers dengan detail yang mencolok, material yang tidak konvensional, atau kolaborasi dengan seniman atau brand lain. Mereka mencari sneakers yang dapat menjadi statement fashion

mencerminkan kepribadian mereka.

Beberapa contoh sneakers dengan desain unik dan inovatif antara lain sneakers dengan sol transparan, sneakers dengan lampu LED, atau sneakers yang terbuat dari material daur ulang. Sneakers ini sering menjadi perbincangan di media sosial dan menjadi incaran para fashion enthusiast.

Merek-merek sneakers lokal juga semakin banyak mengeluarkan produk dengan desain yang unik dan inovatif. Hal ini memberikan pilihan yang lebih beragam bagi Gen Z untuk mengekspresikan diri melalui sneakers.

## Sneakers Ramah Lingkungan

Sejalan dengan kesadaran akan keberlanjutan, Gen Z juga mulai melirik sneakers yang ramah lingkungan, terbuat dari material daur ulang atau diproduksi dengan proses yang berkelanjutan. Mereka ingin berkontribusi positif terhadap lingkungan melalui pilihan fashion mereka.

Beberapa merek sneakers yang fokus pada keberlanjutan antara lain Veja, Allbirds, dan Adidas dengan koleksi sustainable-nya. Sneakers ini terbuat dari bahan-bahan seperti kapas organik, karet daur ulang, dan plastik daur ulang.

Selain itu, Gen Z juga sering membeli sneakers bekas atau thrifted sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan. Mereka mencari sneakers dengan kondisi yang masih baik, lalu memadukannya dengan gaya pribadi atau menambahkan aksesoris khusus agar tampil lebih unik dan berbeda dari yang lain. Hal ini sekaligus menjadi bentuk ekspresi diri sekaligus kontribusi kecil terhadap keberlanjutan. (nei,ist/dya)



**Lagi, Dugaan (dari Hal 1) ...**

**K**omisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan dugaan pelanggaran persaingan usaha yang sehat dalam proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) senilai Rp 3,6 triliun milik PT Pertamina (Persero). Dugaan pelanggaran tersebut merujuk pada indikasi adanya praktik diskriminasi yang dilakukan Pertamina dalam memilih metode pengadaan penyedia terkait proyek tersebut.

Terkait dengan temuan tersebut, Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DKI Jakarta menilai adanya dugaan korupsi. Sehingga, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera turun tangan menyelidikinya. Desakan ini muncul menyusul ditemukannya indikasi pelanggaran prinsip persaingan usaha dalam proyek bernilai triliunan rupiah tersebut.

Ketua LAKI DKI Jakarta, Jerry Nababan, dilansir dari rentak.id, menilai langkah Kejagung sangat diperlukan untuk menindaklanjuti penyelidikan yang telah lebih dahulu dilakukan KPPU. "Kami mendesak Kejaksaan Agung untuk segera menyelidiki dugaan korupsi dalam penunjukan pelaksanaan proyek digitalisasi SPBU. KPPU sudah jelas memiliki data dan bukti awal yang kuat," tegas Jerry dalam keterangannya, Minggu (6/7/2025).

Jerry, memaparkan bahwa proyek digitalisasi SPBU senilai Rp3,6 triliun yang dilaksanakan oleh Pertamina berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ia menyoroti penunjukan langsung yang dilakukan Pertamina terhadap salah satu BUMN tanpa melalui proses tender terbuka.

Ia menambahkan, proyek ini sangat strategis karena berkaitan langsung dengan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di 5.518 SPBU Pertamina di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, proses pengadaan seharusnya dilakukan secara terbuka dan kompetitif agar efisiensi dan kualitas bisa terjaga.

Dengan adanya bukti awal yang cukup, KPPU telah resmi memulai penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran dalam proyek digitalisasi SPBU Pertamina. Langkah ini dianggap penting dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat, adil, dan transparan, terlebih proyek ini menggunakan dana besar dalam skalanasional.

Jerry Nababan pun menekankan agar Kejaksaan Agung tidak tinggal diam dan segera membentuk tim investigasi untuk memastikan tidak ada praktik korupsi dalam proses

penunjukan tersebut. "Jangan sampai alasan sinergi BUMN menjadi tameng untuk menutupi praktik yang merugikan negara dan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan," pungkash Jerry.

Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur menjelaskan bahwa Proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina secara umum mencakup pengadaan sistem near real-time monitoring distribusi dan penjualan BBM di 5.518 SPBU Pertamina dari total sekitar 7.000 SPBU yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Adapun tujuan utama dilaksanakan proyek tersebut untuk melakukan monitoring atau pengawasan konsumsi BBM khususnya solar subsidi di setiap SPBU di seluruh Indonesia," ujar Deswin dalam keterangan di laman KPPU pada Sabtu (5/7/2025).

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan proyek yang bernilai Rp 3,6 triliun tersebut, Pertamina telah melakukan penunjukan langsung salah satu Badan Usaha Milik Negara dengan alasan sinergi BUMN tanpa mempertimbangkan berbagai pelaku usaha lain yang memiliki potensi dan kemampuan melaksanakan proyek

tersebut.

KPPU menilai tindakan penunjukan langsung tersebut berpotensi mengarah pada praktik diskriminasi yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tindakan tersebut juga pernah dilakukan Pertamina dalam penunjukan langsung untuk proyek pembuatan logo yang telah diputus KPPU melalui Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-L/2006.

KPPU menilai bahwa proyek digitalisasi ini memiliki nilai yang cukup besar dan secara langsung memiliki keterkaitan dengan pengeluaran negara terkait BBM bersubsidi. "Seharusnya Pertamina terlebih dahulu membuka kesempatan kepada seluruh pelaku usaha di Indonesia yang memiliki kemampuan melaksanakan proyek tersebut agar diperoleh penawaran harga dan kualitas terbaik," katanya.

Hal tersebut sejalan dengan saran dan rekomendasi KPPU terhadap Pemerintah agar meninjau ulang kebijakan berkaitan dengan sinergi BUMN karena memiliki potensi terjadinya inefisiensi dan hambatan usaha sebagaimana diduga juga terjadi dalam pelaksanaan proyek ini.

Deswin melanjutkan bahwa alternatif pengadaan berbasis wilayah

dengan mekanisme tender terbuka seharusnya bisa menjadi solusi agar kinerja dan efisiensi dapat diukur. Dengan demikian kompetisi usaha tetap terjaga karena mengurangi hambatan masuk dalam industri tersebut. Sebab, masih banyak pelaku usaha lain yang sebelumnya menyatakan kesediaan untuk turut ambil bagian dalam proyek serupa, namun tidak diberi ruang untuk berkompetisi.

"Dengan kata lain, penunjukan langsung yang tidak membuka kesempatan bagi pelaku usaha lain menunjukkan adanya dugaan praktik diskriminasi. Praktik ini mengarah pada pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 tentang larangan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu," katanya.

Merespons bukti awal tersebut, KPPU memutuskan untuk mulai melakukan Penyelidikan atas dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 tentang larangan praktik diskriminasi yang dilakukan Pertamina terhadap pelaku usaha tertentu. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen KPPU untuk menjaga iklim persaingan yang sehat, transparan, dan akuntabel, terutama dalam proyek-proyek strategis nasional yang melibatkan dana publik dalam skala besar. (rls/ist/lut)

## Masalah Persaingan Usaha Sudah Menjadi Sorotan

**MASALAH** persaingan usaha dengan pemberian hak monopoli kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah menjadi sorotan beberapa kalangan dan KPPU. Ini terbukti dengan adanya simposium nasional yang digelar Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU), bekerja sama dengan Universitas Paramadina dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang membahas masalah tersebut.

Dilansir dari laman KPPU, Simposium nasional yang digelar pada pekan lalu itu mengambil tajuk "Undang-Undang BUMN dalam Perspektif Persaingan Usaha", Forum ini mengupas implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara yang merevisi UU No. 19 Tahun 2003, khususnya terkait pemberian hak monopoli melalui Pasal 86M.

Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan hak monopoli kepada BUMN atau anak usahanya melalui Peraturan Pemerintah (PP). Sejumlah pakar hukum dan ekonomi menyampaikan kritik dan masukan terhadap potensi dampak yuridis, institusional, dan ekonomi

dari beleid tersebut.

Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, dalam sambutannya mengatakan pentingnya menyeimbangkan kepentingan negara melalui BUMN dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Ia mengungkapkan bahwa sejak 2020, KPPU telah mengajukan enam saran kebijakan kepada Kementerian BUMN, termasuk mitigasi jabatan rangkap dan penguatan program kepatuhan persaingan.

"Kami ingin memastikan bahwa BUMN dikelola secara profesional dan berdaya saing, tetapi tetap tunduk pada prinsip-prinsip persaingan yang sehat dan adil," ujar Ketua KPPU.

Dia juga mengatakan bahwa simposium ini menjadi ruang diskusi penting bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan kritis dalam menyikapi dinamika peran negara dalam ekonomi, khususnya melalui BUMN.

"KPPU berharap diskusi ini dapat memperkaya perspektif lintas disiplin dan memberikan landasan yang kuat bagi penyusunan kebijakan lanjutan yang tidak hanya berpihak pada kepentingan negara, tetapi juga menjamin iklim usaha

yang sehat, adil, dan kompetitif," katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Kajian dan Advokasi pada Sekretariat Jenderal KPPU, Taufik Ariyanto mengatakan bahwa dalam forum tersebut, para pakar menyampaikan pandangannya mengenai konsekuensi yuridis, institusional, dan ekonomi dari pemberian kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan hak monopoli melalui PP sebagai turunan Pasal 86M.

"Para pakar sepakat bahwa perlu penjabaran definisi, kriteria dan indikator yang jelas dalam perumusan PP. Mereka juga sepakat bahwa peran dan masukan KPPU sangat diperlukan dalam proses pembahasan regulasi dimaksud," katanya.

Selain Ketua KPPU, Anggota KPPU, Eugenia Mardanugraha, Deputi Bidang Kajian dan Advokasi KPPU Taufik Ariyanto, Anggota KPPU Periode 2018-2023 Chandra Setiawan, Guru Besar Universitas Pelita Harapan Prof. (jur) Udin Silalahi, serta Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Universitas Paramadina Dr. Handi Risza Idris hadir dalam simposium. (rls/lut)

# MINAT MENIKAH TURUN, MENAG : INI MEMBUTUHKAN PERHATIAN SERIUS

Minat masyarakat Indonesia untuk menikah ternyata merosot. Kondisi ini bisa dilihat dari penurunan angka perkawinan yang terus terjadi setiap tahun. Atas kondisi ini, Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar sebagai sebuah fenomena yang membutuhkan perhatian serius.

Menag juga menekankan bahwa pencatatan nikah secara resmi di Indonesia sangat penting. Ia meminta seluruh jajaran Kementerian Agama, pusat dan daerah, untuk aktif mengedukasi masyarakat bahwa urgensi pencatatan pernikahan demi perlindungan hak-hak keluarga.

"Saya mohon betul Kementerian Agama dan seluruh jajaran sampai ke tingkat bawah untuk terus mengingatkan masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan," katanya.

Menag mengaku heran masih ada sejumlah pihak yang menjadikan faktor ekonomi sebagai alasan enggan mencatatkan pernikahan. Sebab, pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dipungut biaya alias gratis. Selain itu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) juga menjalankan program nikah massal gratis bagi masyarakat. Program ini memberikan fasilitas pernikahan lengkap tanpa biaya, bahkan termasuk pakaian pengantin, salon, hingga mahar.

Menag mengungkapkan bahwa program nikah massal bukan sekadar seremoni, tetapi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan keluarga dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait pencatatan pernikahan.

Menag juga mengungkapkan, pernikahan bukan sekadar urusan pribadi, tetapi bagian dari identitas budaya bangsa. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak meniru praktik-praktik pernikahan yang bertentangan dengan nilai dan



Ilustrasi pernikahan

norma Indonesia.

"Kita harus menjaga budaya kita sendiri. Jangan sampai terjadi westernisasi kebudayaan kita dalam hal perkawinan," pungkasnya.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah pernikahan pada 2020 mencapai 1.780.346 pasangan. Namun, angka itu turun drastis menjadi 1.478.302 pada 2024.

Ironisnya, penurunan ini terjadi saat angka perceraian tetap tinggi. Setiap tahun, sekitar 400 ribu pasangan memilih berpisah. Fenomena ini menunjukkan pergeseran sikap terhadap pernikahan, terutama di kalangan Generasi Z.

Wakil Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan PP Aisyiyah, Adib Sofia, menyebut Generasi Z hidup dalam tekanan kompetisi global yang ketat. Mereka lebih fokus mengejar pendidikan, karier, dan pencapaian pribadi.

"Pernikahan bukan lagi tujuan utama. Mereka lebih memilih mapan secara finansial terlebih dulu," ujar Adib seperti dilansir Muhammadiyah, Jumat (4/7/2025).

Ia menyoroiti peran media sosial yang mendorong gaya hidup serba pamer. Banyak anak muda merasa malu jika belum punya rumah, mobil, atau pekerjaan mapan saat menikah. "Semua harus di-upload. Jadi, kecukupan finansial jadi syarat

mutlak," katanya.

Bukan hanya itu, pemberitaan seputar perceraian selebritas juga ikut memengaruhi pola pikir anak muda. Menurut Adib, media terlalu sering menyoroiti kegagalan rumah tangga publik figur. "Ini menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran untuk membina keluarga," jelasnya. Paket liburan keluarga

Gaya hidup individualistik, ketidakstabilan ekonomi, serta tingginya biaya hidup juga membuat pernikahan terasa berat. Generasi Z cenderung menunda bahkan menghindari pernikahan. Mereka memiliki kriteria pasangan yang lebih spesifik dan tak mudah dipenuhi.

Adib menilai narasi publik tentang pernikahan kini dipenuhi berita negatif. "Media jarang menampilkan sisi positif. Prinsipnya, bad news is good news," sindirnya.

Padaahal, menurutnya, pernikahan merupakan perjanjian kokoh yang membawa ketenangan, cinta, dan kasih sayang. "Ini penyempurna agama dan ciri umat terbaik," tegasnya.

Ia mengajak masyarakat, terutama media, untuk mengangkat kembali nilai-nilai positif dalam berkeluarga. Adib juga menekankan peran penting orang tua dalam memberi teladan dan membentuk pandangan anak tentang keluarga.

"Orang tua harus hadir sejak awal. Mulai dari memberi nama, mencukupi kebutuhan dasar, hingga membimbing anak ke jenjang pernikahan," ucapnya.

Keluarga, lanjut dia, memiliki banyak fungsi, mulai dari edukasi, sosialisasi, proteksi, hingga rekreasi biologis. Ia mengingatkan, Tuhan sudah menjamin rezeki setiap makhluk dan tidak memberi cobaan di luar kemampuan manusia. Paket liburan keluarga. "Kita diciptakan dengan akal untuk bertahan dan beradaptasi," tuturnya.

Adib berharap narasi positif soal pernikahan bisa menjadi arus utama. Ia menegaskan, pernikahan bukan hanya tentang beban, tapi juga tentang kebahagiaan, keberkahan, dan makna hidup.

"Kalau semua pihak bersinergi, kita bisa mengembalikan kepercayaan generasi muda terhadap pernikahan," pungkasnya. (rls/ist/lut).



"Biasanya 2,2 juta orang menikah setiap tahun. Kini jumlahnya menurun. Ini tidak bisa dibiarkan karena bisa menggeser nilai-nilai budaya kita,"

**NASARUDDIN  
UMAR**  
Menteri Agama